

# EFEKTIVITAS PENYITAAN HARTA KEKAYAAN MILIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MENGURANGI TUNGGAKAN WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

**Risa Nur Istiyah, Ratih Nur Pratiwi, Stefanus Pani Rengu**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: risaistiyah@gmail.com

**Abstract:** *The Effectiveness of Confiscation Against Organizational Taxpayer Asset to Reduce Taxpayer Default (Study of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). This confiscation against the asset is a final action of collection after the defaulted taxpayer is sent with letter of reprimand, letter of compulsion, and letter of confiscation (SPMP – Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Research type is qualitative with descriptive approach using Miles-Huberman's Analysis Method. Result of research has shown that the confiscation against organizational taxpayer asset is able to force the defaulted taxpayer to make settlement in 2 weeks before the preparation of auction, as long as the confiscation is valid on the predetermined regulation. Confiscation against organizational taxpayer involves two confiscating officers with authority and duty as the tax confiscator. Some factors supporting and constraining the effectiveness of confiscation against organizational taxpayer asset are found. The constraining factors are that organizational taxpayers may not want to sign Confiscation Agenda, the confiscating officers are not allowed to access the asset, and the difficulty to find the asset to be confiscated.*

**Keywords:** *confiscation against, organizational taxpayer*

**Abstrak:** Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Penyitaan Harta Kekayaan milik wajib pajak badan merupakan tindakan penagihan terakhir yang dikarenakan sebelumnya ada surat teguran, surat paksa hingga surat SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakannya dalam waktu 2 minggu sebelum persiapan lelang dan proses penyitaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penyitaan pada wajib pajak badan dilakukan oleh dua juru sita sesuai wewenang dan tugasnya sebagai juru sita pajak, namun masih adanya faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Faktor penghambatnya adalah dari pihak wajib pajak badan tidak mau mendatangani BAS (Berita Acara Sita), juru sita tidak diperbolehkan masuk, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita.

**Kata Kunci:** penyitaan harta, wajib pajak badan

---

## Pendahuluan

Pajak sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pemba-ngunan Negara Indonesia seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Tahun 1983 sistem pemungutan pajak *official assessment system* menjadi *self assessment system*, Indonesia sekarang menganut *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* sering mengakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak karena memang memungkinkan untuk melakukan kecurangan, sehingga ketika kemudian diadakan pemeriksaan diketahui adanya tunggakan pajak yang harus dibayar terhadap tunggakan pajak tersebut.

Tunggakan pajak KPP Pratama Malang Utara bisa dilihat dari peningkatan dan penurunan SKP (surat ketetapan pajak) pertahunnya. Apabila dilihat kondisi hutang pajak pertahunnya pencairan tunggakan pada SKP (surat ketetapan pajak) tahun 2011 sejumlah 211 pencairan tunggakan senilai 255,762,399 sedangkan pada tahun 2012 skp sejumlah 74 dengan pencairan tunggakan 68,681,731 hal

tersebut terlihat dari jumlah skp mempengaruhi pencairan.

KPP Malang Pratama Utara memiliki target penerimaan perpajakan dalam rencana dan realisasi penerimaan pertahunnya yang mencakup wilayah kecamatan lowokwaru dan kecamatan belimbing kota malang. Rencana penerimaan perpajakan yang dicapai tersebut harus melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan dan penyampaian Surat teguran, Penerbitan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan, Pencegahan dan Penyanderaan. Penagihan pajak dengan surat paksa dibuat agar dapat memberikan penekan pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan negara berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak boleh berat sebelah, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum.

Ketetapan dan penetapan pajak berupa bentuk surat harus dilunasi dalam jangka 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan surat penetapan dan ketetapan tersebut. Apabila utang wajib pajak yang ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tidak dilunasi maka kepada wajib pajak akan dilakukannya teguran bila mana dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa. Menurut Waluyo (2011, h.95) penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak.

Untuk memperoleh pelunasan hutang dari wajib pajak badan juru sita melakukan penyitaan terhadap semua harta milik wajib pajak badan baik itu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Penyitaan barang penanggung pajak pada akhirnya bisa saja berujung ke tindakan lelang disebabkan wajib pajak atau penanggung pajak apabila tidak adanya pencabutan sita dengan tindakan melunasi tunggakan pajaknya. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan KPP Pratama Malang Utara terdapat gejala-gejala karena adanya tindakan penagihan kepada pihak

wajib pajak badan yang tidak menyelesaikan perpajakannya dengan semestinya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang harus ditanda tangani oleh juru sita pajak, saksi dan wajib pajak.

### Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan publik ini berkaitan dengan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak, melaksanakan penyitaan berdasarkan Undang-Undang Negara yang diimplementasikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di seluruh Indonesia dan sudah dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2005, h.65) Implementasi Kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Menurut Rochmat Soemitro dalam Ilyas (2013, h. 6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Wajib Pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer dan secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Waluyo (2011, h.23) menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penanggung pajak hampir sama dengan wajib pajak yang di istilahkan orang atau badan tetapi penanggung pajak mempunyai pengertian tersendiri dalam pembayaran pajak serta utang pajak Menurut Mardiasmo (2006, h.113) penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2011, h.44) badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau non-usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan dan perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, Lembaga, Dana pensiun, Bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya. Terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya.

Penyitaan terjadi pada wajib pajak di sebabkan tunggakan pajak. menurut Resmi (2003, h.20) Tunggakan Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyitaan merupakan suatu tindakan paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagihan pajak. Menurut Mardiasmo (2006, h.116) bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Hadi (1995, h.47) Penyitaan merupakan serangkaian tindakan dari juru sita pajak negara yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Peran juru sita pajak merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penagihan dengan kekuasaan dan wewenang. Menurut Waluyo (2011, h.92) juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kementerian keuangan untuk penagihan pajak pusat.

Efektivitas sangat penting dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan karena efektivitas merupakan suatu alat ukur tingkat keberhasilan

seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Atmosudirjo (1988, h.81) yang menjelaskan Efektivitas merupakan kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas dapat dinilai berhasil bila pelaksanaan penyitaan itu dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Efektivitas juga merupakan suatu kondisi sebenarnya terjadi dan di kaitkan dengan tujuan yang di kehendaki seperti menurut Gie (1997, h.108) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Fokus dari penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan rangka mengurangi tunggakan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
  - a. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
  - b. Jenis harta kekayaan milik wajib pajak badan yang disita oleh juru sita
  - c. Peran juru sita dalam pelaksanaan penyitaan
  - d. Alasan adanya penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
2. Faktor pendukung dan penghambat yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

lokasi Penelitian memilih di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 29-30 Malang. Situs penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Utara di bagian Penagihan karena bagian ini sangat kompleks tugasnya dalam penagihan pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian data yang di peroleh dari lapangan dianalisa dengan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Pembahasan

1. **Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak**
  - a. **Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan**

Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan telah dilaksanakan oleh KPP

Pratama Malang Utara bertujuan untuk menegakan kepatuhan wajib pajak dalam mengatasi masalah tunggakan wajib pajak.

Tahun 2008 hingga 2012 penyitaan telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang utara ada 15 pelaksanaan penyitaan pada wajib pajak badan dengan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan berjumlah 13 wajib pajak badan, selebihnya ada 2 yang berujung ke lelang dan banding. Dari keseluruhan jumlah pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara hanya ada dua wajib pajak dari tahun 2008 hingga 2012 yang tergolong wajib pajak tidak mendapatkan surat penerbitan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan. Terlihat dengan pelaksanaan penyitaan ini bahwa wajib pajak badan baru mampu melunasi tunggakannya setelah assetnya di sita.

Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak KPP Pratama Malang Utara mempunyai target per 1 kali sita per tri wulan kali 1 tahun jadi satu tahun ada 4 kali sita. Target tersebut ditargetkan KPP Pratama Malang Utara maksimal 1 kali sita per triwulan dikarenakan ada target pencairan selain itu juga pelaksanaan penyitaan bukan pelaksanaan yang mudah prosesnya pun susah, oleh sebab itu diterbitkannya surat teguran dan surat paksa supaya dapat memaksimalkan target pelaksanaan penyitaanya.

Pelaksanaan sita KPP Pratama Malang Utara terhadap wajib pajak badan ketika keadaan kondisi wajib pajak badan pailit maka juru sita KPP Pratama Malang Utara melakukan tindakan penyitaan ke asset penanggung pajaknya. Proses Penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita KPP Pratama Malang Utara dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap dengan memuat hari dan tanggal, nomor, nama jurusita pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita serta tempat penyitaan setelah itu adanya penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita dari wajib pajak badan. Juru sita KPP Pratama Malang Utara memanggilkan seorang saksi dari pemerintah daerah setempat dan saat pelaksanaan tersebut tidak dihadiri penanggung pajak juru sita tetap membuat alasan di berita acara pelaksanaan penyitaan tentang penanggung pajak tidak kehadirannya. Selanjutnya juru sita memasang dengan menempel salinan berita acara pelaksanaan sita dan penempelan segel sita.

#### **b. Jenis Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan yang Disita Oleh Juru Sita**

Jenis harta yang disita oleh KPP Pratama Malang dapat berupa jenis harta bergerak dan

tidak bergerak. Tahun 2008 hingga 2012 Jenis harta yang disita berupa tanah, mobil, mesin, motor dan uang tunai. Dari hasil penyitaan yang sering dijadikan jaminan di KPP Pratama Malang utara yaitu tanah, mobil, dan mesin. Harta kekayaan milik wajib pajak badan yang disita sesuai dengan nilai tanggungan tunggakan wajib pajak.

Jenis harta wajib pajak pada pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara ini lebih ke barang yang bergerak terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap jenis harta perlu ada hitungan jumlah berapakah jenis barang yang disita dengan jumlah harga jenis barang yang disita. Jenis harta yang disita ada taksiran harga pasar yang sewajarnya dari pihak KPP Pratama Malang Utara, sehingga bisa membatasi jumlah berapa harta yang akan sita.

#### **c. Peran Juru Sita Pajak dalam Pelaksanaan Penyitaan**

Peran juru sita KPP Pratama Malang utara ini memiliki wewenang sesuai batas yang ada di aturan UU pasal 3 Nomer 19 Tahun 2000. Proses penagihan di KPP Pratama Malang Utara dilaksanakan oleh dua juru sita yang sama-sama memiliki peran tugas sebagai juru sita di KPP Pratama Malang Utara dengan berpangkat serendah-rendahnya pengatur mudah Gol. II/a dan bersikap tanggung jawab, penuh pengabdian, jujur dalam menjalankan proses penyelenggaraan sita. Bapak Fuad dan Ibu Evin adalah juru sita yang di tunjuk oleh kepala KPP Pratama Malang Utara untuk menduduki jabatannya sebagai juru sita yang diberi tanggung jawab terhadap tindakan penagihan di KPP Pratama Malang Utara. Juru sita merupakan ujung tombak dalam penagihan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Apabila dilihat pelaksanaan penyitaan juru sita bertanggung jawab atas keberhasilan tugas juru sita pada penyelesaian tunggakan pajak yang tidak tertagih dan keberhasilan tersebut telah tercapai pada KPP Pratama Malang Utara dengan penyelesaian tunggakan wajib pajak badan dalam waktu dua minggu sebelum persiapan lelang.

#### **d. Alasan Adanya Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan**

Alasan adanya penyitaan harta kekayaan terhadap wajib pajak ini dikarenakan tunggakan wajib pajak badan yang tidak dibayar dan tagihan yang tidak diidahkan. Pada tahap awal penagihan persuasif yang melauhi himbauan, telfon, diskusi dan dialog agar wajib pajak badan membayar dan menyetor sendiri pajaknya dengan tepat waktu serta dengan mengirimkan surat via pos tapi wajib pajak tersebut masih saja

tetap tidak mau membayar dan melunasi tunggakan pajaknya. Sehingga KPP Pratama Malang Utara melakukan penagihan aktif kepada wajib yang tak kunjung membayar hutangnya. Penagihan aktif dengan adanya surat teguran, setelah kurang lebih 21 hari surat teguran tak diindahkan maka akan dikeluarkan surat paksa dalam waktu 2 kali 24 jam dan jika surat paksa tak diindahkan maka juru sita akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam waktu 14 hari jika masih saja wajib pajak tidak membayar tunggakannya maka dilakukan persiapan lelang.

Dari 2008 hingga 2012 jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara meningkat mulai 3,949 wajib pajak badan sampai menjadi 5,644 wajib pajak badan yang terdaftar. Kemudian wajib pajak badan terlihat banyak jumlah tunggakannya 1,807 di tahun 2008 dibandingkan tahun 2009 hingga 2012 wajib pajak badan yang menunggak masih di bawah angka tunggakan tahun 2008. Kondisi wajib pajak badan yang menunggak juru sita KPP Pratama Malang Utara melakukan dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Jumlah surat teguran yang diterbitkan paling banyak 6,013 surat teguran pada tahun 2008 selain itu surat paksa diterbitkan juga paling banyak di tahun 2008 dengan jumlah 3,442 surat paksa.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada pada Kantor Pelayanan Pajak dalam Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan**

### **a. Faktor Pendukung**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu pendukung dalam membayar pajak badan serta diwajibkan melaporkan SPT tahunan. Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan di karenakan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara kurangnya kesadaran dari wajib pajak badan untuk melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya, sehingga tunggakan yang timbul dari tahun ketahun itu dari denda tidak melaporkan SPT tahunannya. Wajib pajak mengira dikarenakan perusahaan belum berjalan jadi tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT.

Selanjutnya faktor pendukung dari Wajib Pajak badan dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh juru sita KPP Pratama Malang Utara atas tunggakan pajak PPN namun wajib pajak mengelak atas tunggakan pajak sehingga surat paksa yang dilaksanakan juru sita pun tidak dihiraukan dan masih tidak mau membayar sampai akhirnya berujung pada penyitaan harta milik wajib pajak berupa alat perusahaan.

### **b. Faktor Penghambat**

Proses sita dengan adanya penandatanganan BAPS wajib pajak badan tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita), Jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, Seringkali terjadi bahwa utang pajak wajib pajak jumlahnya cukup materil, namun jurusita pajak tidak dapat menemukan harta sita yang memadai, diketemukannya harta sita, tapi menurut wajib pajak barang-barang tersebut bukan miliknya, jurusita pajak tidak dapat memberitahukan surat paksa atau melaksanakan SPMP (surat perintah melaksanakan penyitaan) karena tidak dapat menemukan wajib pajak, Hal tersebut dikarenakan tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan, adanya Wajib pajak telah pindah ke alamat lain yang tidak diketahui, Wajib pajak ada tetapi jurusita pajak tidak diperbolehkan memasuki rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui jurusita pajak.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak tergolong efektif baik ditinjau dari segi jumlah wajib pajak yang melunasi lebih banyak dari pada yang berujung lelang dan banding. Penyebab tercapainya efektif pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak badan yang menunggak antara lain wajib pajak mampu membayar tunggakan dalam waktu 14 hari sebelum lelang.

Adanya Faktor penghambat dan pendukung dalam penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan ini. Faktor pendukung penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dari salah satu faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunannya sebagai wajib pajak badan selain itu faktor penagihan aktif. Dalam faktor penghambat yang masih terjadi pada juru sita dikpp pratama malang utara seperti wajib pajak tidak mau menandatangani BAS, juru sita tidak diperolehkan masuk, tidak adanya obyek sita, dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada Jurusita Pajak supaya meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik pajak badan agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

---

### Daftar Pustaka

- Wahab, Solichin Abdul. 2005. **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1988. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Wirawan B., and Richard Burton. 2013. **Hukum Pajak**. Jakarta, Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2011. **Hukum Pajak ed 5**. Jakarta, Salemba Empat.
- Gie, The Liang. 1997. **Ensiklopedia Administrasi**. Jakarta, Gunung Agung.
- Hadi, Moeljo. 1995. **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara**. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2006. **Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2006**. Yogyakarta, Andi.
- Miles, dan Hoberman. 1992. **Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Baru Tentang Metode Baru**. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Resmi, Siti. 2003. **Perpajakan Teori dan Kasus edisi 2**. Jakarta, Salemba.
- Waluyo. 2011. **Perpajakan Indonesia ed.10**. Jakarta, Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.